

TANTANGAN PERUBAHAN TATANAN DUNIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.

Garis Besar Materi Presentasi

1. TESIS ATAU ARGUMEN UTAMA
2. ALASAN-ALASAN PENTING DI BALIK ARGUMEN DI ATAS
3. CETAK BIRU POLITIK RI DALAM PERBANDINGAN
4. MAKNA KEBANGKITAN CHINA DAN INDIA
5. MENYIKAPI AS DI BAWAH DONALD TRUMP
6. KEPEMIMPINAN GLOBAL AS DAN CHINA
7. KERJASAMA INDO-PASIFIK
8. SOFT-POWER DIPLOMACY
9. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

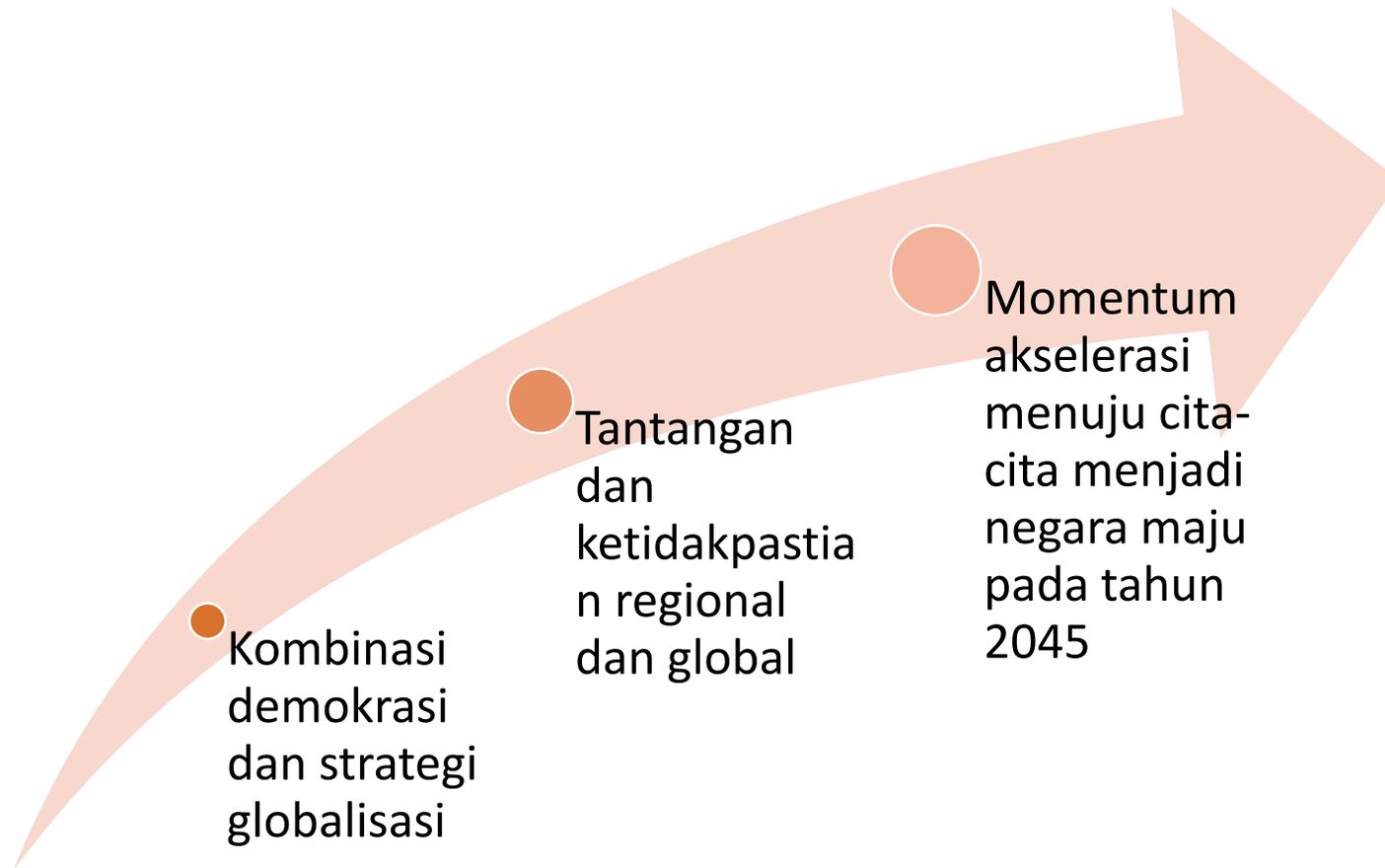
Komponen Penting Argumen

Demokrasi dan strategi
globalisasi

Tantangan regional dan global

Negara maju tahun 2045

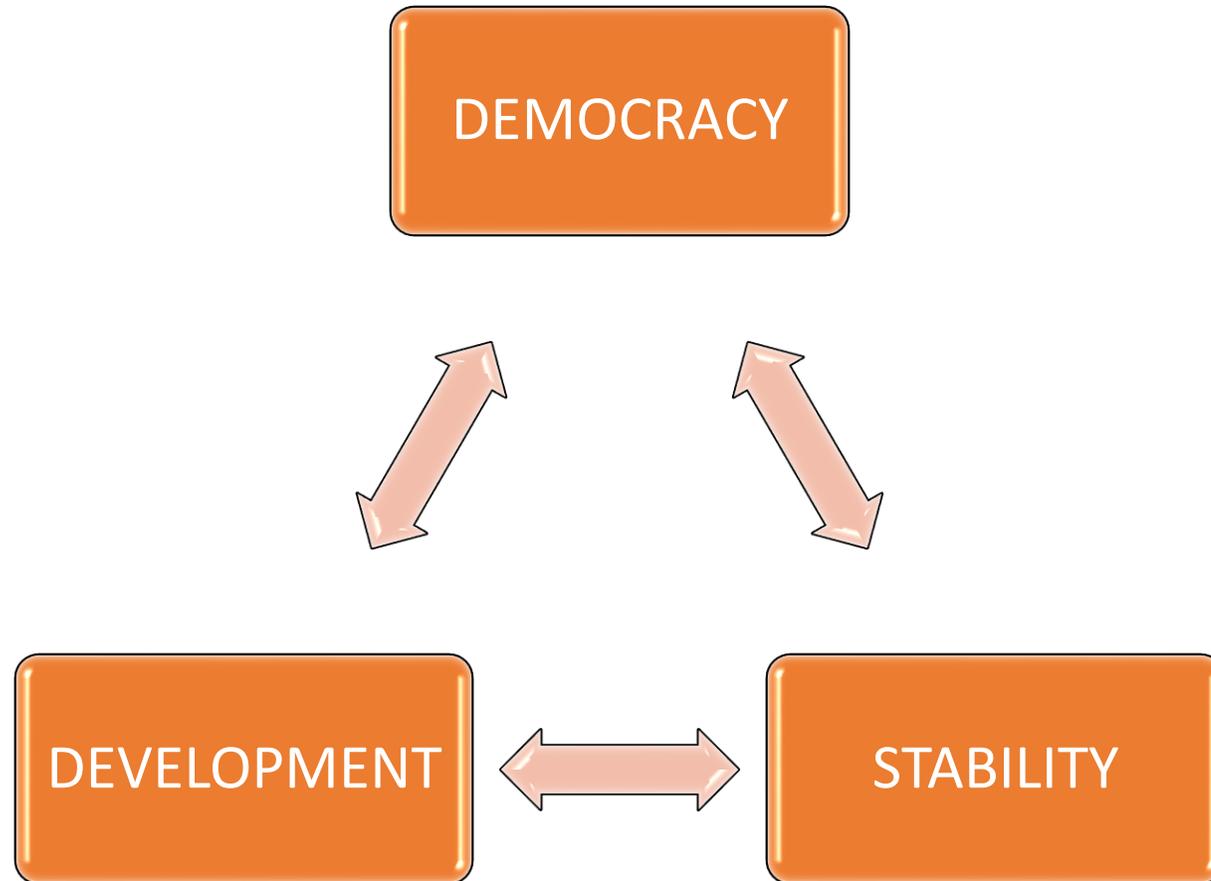
Penjabaran Tesis Utama



Konsolidasi Demokrasi Dalam Dimensi Komparatif

- Tingkat penerimaan demokrasi yang tinggi sebagai mekanisme suksesi kekuasaan (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden) 1999, 2004, 2009 dan 2009 berjalan relatif damai (bandingkan dengan negara berkembang lain seperti Mesir, Malaysia, Thailand dan Myanmar).
- Indonesia telah memiliki cetak biru sistem politik sebagai kerangka untuk tata kelola kebhinekaan yang intinya adalah sistem presidensial berbasis banyak partai.

Tesis amitav acharya :
Indonesia matters: asia's emerging democratic power (2014)



Perbandingan Dengan Cetak Biru Politik Negara Lain

- Model China (*The Beijing Consensus*):

Sentralisasi kekuasaan di tangan Partai Komunis China demi menjamin stabilitas untuk mendukung strategi globalisasi dengan membuka ekonomi ke dunia luar dan mendukung rezim perdagangan bebas sambil meraih keunggulan iptek untuk menantang keunggulan dunia Barat.

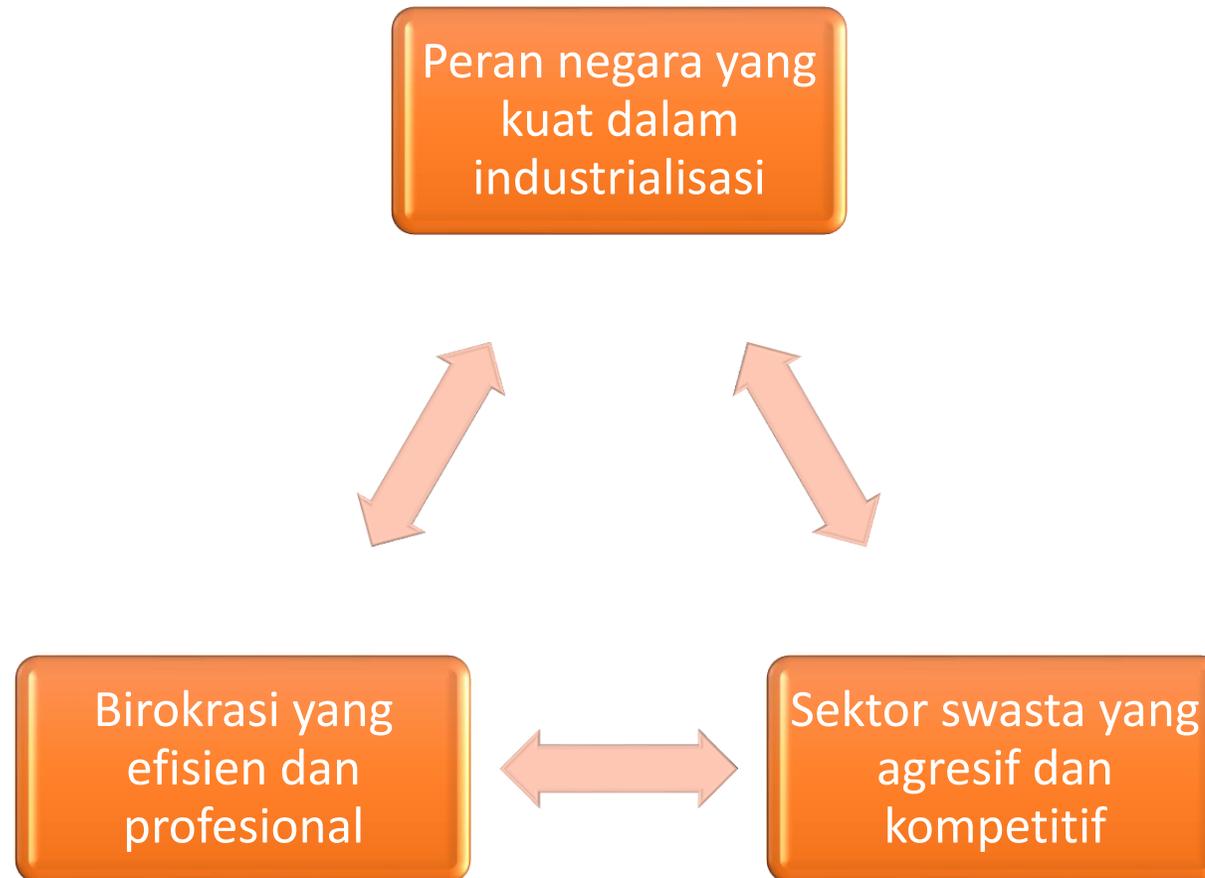
- Model India (*The Delhi Consensus*):

Kombinasi antara demokrasi multi-partai dengan keunggulan teknologi informasi yang mengantarkan India menjadi raksasa ekonomi Asia setelah China.

- Model Jepang pasca PD II (*Developmental State*):

Kombinasi peran negara yang aktif dalam industrialisasi, birokrasi yang efisien dan profesional serta sektor bisnis yang agresif dan kompetitif merupakan sinergi yang mendasari keberhasilan Jepang sesudah PD II.

Model Jepang



Pelajaran Untuk Indonesia

1. Dari model China: Indonesia bisa memetik pelajaran tentang pentingnya strategi globalisasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan perencanaan yang matang.
2. Dari model Jepang: sinergi antara negara atau pemerintah yang kuat dan aktif dalam industrialisasi, birokrasi yang efisien dan profesional serta sektor swasta yang agresif dan ekspansi ke luar negeri merupakan tiga syarat kunci untuk naik ke level yang lebih tinggi dalam persaingan global.
3. Dari model India: kebhinekaan bisa dikelola dalam kerangka politik demokratis dan negara berkembang bisa memilih untuk unggul dalam teknologi informasi dan bisa menyaingi negara-negara Barat.

Makna Kebangkitan Ekonomi Dan Militer China Dan India

- China menjadi tujuan ekspor utama bagi Indonesia dan sumber investasi asing melalui berbagai mekanisme khususnya program *One Belt, One Road* (OBOR) dan *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB).
- Seorang diplomat dari Kedutaan Besar China di Jakarta, Wang Liping, memperkirakan bahwa dalam lima tahun ke depan total impor barang dan jasa China akan melampaui 10 triliun dollar AS (*Kompas*, 27 Januari 2018).
- Sayangnya baik dalam hal ekspor maupun investasi, Indonesia masih ketinggalan jauh di belakang negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnam.

- Dalam sejarah kebangkitan ekonomi suatu negara besar biasanya diikuti oleh hasrat meraih keunggulan militer dan kebijakan yang ekspansionist (Jerman sebelum PD I, Jepang jelang PD II, dan AS pasca PD II).
- China selalu mengklaim *peaceful rise*, tetapi kebijakan asertif dan klaim sepihak atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan tetap menimbulkan kecurigaan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia.
- Meskipun China sudah setuju untuk memulai pembicaraan tentang Code of Conduct (CoC) dengan ASEAN di LCS, bisa diduga bahwa China tidak akan mengkompromikan kontrol *de facto* atas pulau-pulau tersebut.

Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Wilayah Di Lcs

- Indonesia tetap mempertahankan statusnya sebagai negara *non-claimant*, artinya tetap menjaga keutuhan NKRI sesuai hukum internasional dan tidak ada wilayah kita yang diklaim oleh negara lain termasuk China dengan deklarasi 9 garis putusnya (*nine-dash line*).
- Indonesia akan tetap menggunakan platform ASEAN sebagai wadah untuk menyelesaikan konflik secara damai demi stabilitas kawasan dan kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) di LCS yang dijamin oleh hukum internasional.
- Karena itu kebijakan yang mempromosikan sentralitas ASEAN yang mampu mempertemukan negara-negara besar seperti AS, China, Rusia dan Jepang perlu dipertahankan untuk meningkatkan *bargaining power* Indonesia dalam diplomasi regional.

KEPEMIMPINAN RI DI ASEAN DAN TANTANGANNYA

- Penggunaan platform ASEAN dan kepemimpinan tradisional RI di dalamnya tetap menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia demi stabilitas kawasan dan integrasi ekonomi regional dengan segala peluang ekonomi yang tercipta.
- Tetapi RI harus menghadapi strategi China yang lebih suka *one on one policy* dengan negara-negara ASEAN yang berpotensi mengurangi kohesi dan soliditas ASEAN sebagai entitas regional.
- Perbedaan kebijakan negara-negara ASEAN yang sifatnya pragmatis dan lebih menonjolkan kepentingan nasional daripada kepentingan bersama. Contohnya Vietnam dan Philipina ttg isu LCS.

Tiga Instrument Yang Digunakan China Di Asia Tenggara

Market power – international trade

Foreign Direct Investment - FDI

Loan and Financial Assistance – OBOR DAN AIIB

MENYIKAPI AS DI BAWAH DONALD TRUMP

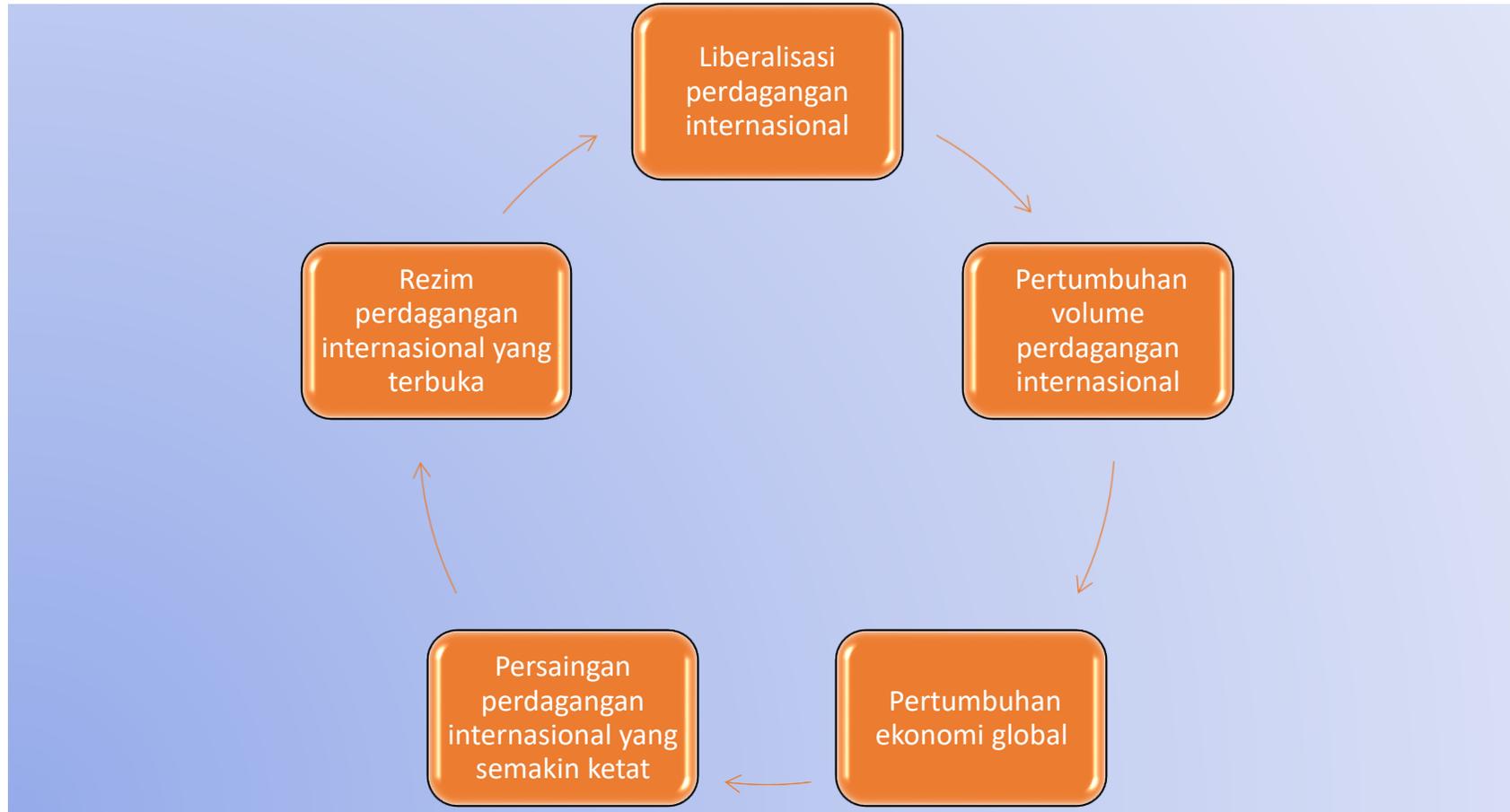
- AS memiliki kepentingan strategis baik ekonomi maupun keamanan di Asia-Pasifik meskipun di bawah Donald Trump AS lebih menggunakan pendekatan bilateral daripada multilateral.
- Meskipun AS telah mundur dari rencana kerjasama Trans-Pacific Partnership (TPP), Washington tetap menjaga hubungan baik dengan sekutu-sekutu tradisionalnya seperti Jepang, Australia dan Korea Selatan.
- Kehadiran AS di Asia-Pasifik masih diperlukan sepanjang tidak dalam rangka *struggle for power* dengan China tapi berperan konstruktif dalam rangka menjaga stabilitas Kawasan.
- Kebijakan proteksionisme Trump yang menaikkan tarif impor baja 25% dan alumunium 10% berpotensi memicu perang dagang dengan China tidak menguntungkan siapapun dan karena itu harus ada dialog menciptakan keseimbangan perdagangan internasional yang baru.

- Indonesia perlu mempertimbangkan dengan cermat apakah harus ikut bergabung dengan 11 negara TPP mengingat ada 4 negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Brunei dan Vietnam) sudah bergabung dan akan dapat kemudahan tarif dari Jepang sebagai ekonomi terbesar dalam kerjasama ini.
- Indonesia tidak boleh mengesampingkan persaingan di antara sesama anggota ASEAN karena mereka menyerbu pasar yang sama di Asia-Pasifik (AS, China, Jepang dan Korea Selatan).
- Diperlukan kombinasi yang tepat antara penggunaan platform bilateral dan regional yang tepat dalam membina hubungan dengan mitra dagang utama Indonesia seperti China, Jepang, Korea Selatan dan AS.

Efek Negatif Perang Dagang



PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN GLOBAL PASCA PD II



Kepemimpinan global as dan china

- Donald Trump sebagai Presiden AS dengan kebijakan ekonominya yang terkesan proteksionist, menimbulkan spekulasi apakah kepemimpinan global AS dalam tatanan ekonomi global yang liberal berakhir?
- Bangkitnya Tiongkok sebagai raksasa ekonomi baru memunculkan pertanyaan system nilai apa yang akan mendasari kepemimpinan global Tiongkok?
- Bagaimana dampaknya terhadap masa depan diplomasi ekonomi RI?

Tinjauan historis pax americana

- Pasca Perang Dunia II AS dan Sekutu Barat membangun arsitektur ekonomi politik global untuk menjamin dominasinya melalui instrumentalisasi Bretton Woods Institutions (IMF, World Bank dan GATT/WTO).
- Kombinasi kekuatan ekonomi AS dan nilai-nilai liberal termasuk liberalisasi perdagangan merupakan strategi AS untuk menjalankan hegemoni global meskipun sejak 1970an semakin tersaingi oleh Jepang dan Eropa Barat (Uni Eropa sejak 1990an).

- Dengan kemenangan Donald Trump orang akan mempertanyakan bagaimana kelanjutan policy AS terkait peranan lembaga-lembaga Bretton Woods sementara peranan Tiongkok dalam lembaga-lembaga tersebut mulai diperhitungkan secara serius.
- Pada saat yang sama Tiongkok muncul dengan inisiatif baru baik melalui kerjasama BRICS maupun pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung Belt and Road Initiative (BRI) yang akan memperluas sphere of influence Tiongkok.

- Teori yang mendasari kepemimpinan global AS adalah kompatibilitas antara system demokrasi liberal dengan rezim internasional baik ekonomi maupun politik keamanan yang didasarkan pada nilai-nilai liberal.
- Dalam bukunya yang berjudul *Pax Sinica: Geopolitics and Economics of China's Ascendance*, Y.Y. Kueh berargumen bahwa Pax Americana belum tergantikan dan alternatif yang lain seperti Pax Sinica mengandung kelemahan intrinsik untuk mengemban tugas kepemimpinan global.

- Sistem politik partai tunggal Tiongkok sangat jauh beda dan bertentangan dengan prinsip demokrasi liberal. Secara ekonomi Tiongkok sudah terlibat jauh dalam liberalisasi perdagangan baik di tingkat multilateral melalui WTO maupun skala regional seperti *China - ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)*.
- Teori apakah yang mendasari kepemimpinan global Beijing? Kredensial apa yang dimiliki Beijing untuk mendesak negara-negara lain di bawah kepemimpinannya mematuhi norma-norma kemanusiaan yang bersifat universal?
- Rusia dan Tiongkok agak gamang untuk mengambil alih kepemimpinan dalam penyelesaian konflik di Suriah karena orientasi ideologis yang tidak jelas.

- Kepemimpinan global AS yang bernuansa liberal ditunjang oleh aktivisme jejaring masyarakat sipil internasional (*transnational civil society networks*) dalam berbagai isu seperti demokrasi, HAM, gender, lingkungan hidup, dialog antar iman, keadilan sosial dan kemiskinan.
- Meskipun sering terjadi antagonisme antara AS dengan berbagai NGO internasional ini namun dalam satu hal kedua pihak sepakat bahwa negara tidak boleh mengekang apalagi menindas hak-hak sipil rakyat.
- Negara dan *civil society* memperjuangkan kepentingan publik (*public goals*) dan menjaga keadaban (*civility*) dalam ruang publik (*public sphere*) demi menghormati martabat kemanusiaan (*human dignity*).

Bagaimana sikap Indonesia menghadapi persaingan as dan tiongkok?

- Sikap agresif Tiongkok di LTS yang berbarengan dengan sikap Donald Trump yang terkesan ingin “mundur” dari Asia membuat sekutu-sekutu AS di wilayah ini seperti Jepang, Korea Selatan dan Australia mulai khawatir tentang isu kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) di LTS yang merupakan jalur perdagangan strategis bagi ketiga negara tersebut.
- Mengingat pola konflik teritorial dan historis di Asia Timur, Jepang juga cemas tentang implikasi jangka panjang kebijakan *inward-looking* Donald Trump. Pada saat yang sama Korea Selatan masih membutuhkan perlindungan AS terhadap ancaman nuklir Korea Utara.

- TPP (*Trans-Pacific Partnership*) yang tadinya diandalkan oleh Presiden Barack Obama sebagai pilar perdagangan dan investasi AS dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Asia telah ditinggalkan oleh Donald Trump. Pengenaan tarif 25% impor baja dan 10% impor aluminium berpotensi menimbulkan perang dagang AS dan China.
- RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) sebagai kerjasama perdagangan yang lebih longgar dan akomodatif diperkirakan akan terus dipromosikan dan bahkan Tiongkok tampil sebagai pendukung utama rencana yang lebih luas dan inklusif yaitu FTAAP atau *Free Trade Area of the Asia Pacific*.

- Mencerermati perubahan lingkungan strategis di atas, apa yang harus dilakukan Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif? Dari pemaparan di atas jelas terlihat daya tarik Indonesia tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga strategis keamanan.
- Posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) di kawasan menjadi sangat penting (*indispensable*) karena berpeluang tampil sebagai inisiator pemeliharaan stabilitas keamanan regional yang dibutuhkan semua pihak.

- Dalam konteks ini Indonesia yang berprinsip menjaga jarak yang sama (*equal distance*) dengan kekuatan-kekuatan besar memiliki *soft power* untuk memainkan peran yang konstruktif di tengah kegalauan negara-negara tetangganya.
- Dalam kaitan ini doktrin keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*) yang pernah dilontarkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tetap relevan untuk digunakan.

Catatan penting untuk indonesia

- Pertama, konsistensi Indonesia dengan prinsip ini justru menjadikannya sebagai mitra terpercaya (*credible partner*) dan dapat diterima semua pihak.
- Kedua, dalam konteks kekinian prinsip bebas aktif tidak lagi dibingkai dalam pertentangan ideologis kapitalisme versus komunisme, tetapi kombinasi yang cerdas antara kekayaan imajinatif tradisi politik luar negeri warisan Mohammad Hatta dan optimalisasi pencapaian kepentingan nasional.

- Ketiga, melalui rangkaian pertemuannya dengan pimpinan Beijing dan Washington tampaknya Presiden Joko Widodo telah cukup piawai mengelola politik luar negeri bebas aktif sambil mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi.
- Keempat, meskipun ada upaya memecah-belah ASEAN, Indonesia harus tetap mempertahankan kompatibilitas antara politik luar negeri bebas aktif dan kapitalisasi platform regional ASEAN demi meningkatkan daya tawar terhadap kekuatan-kekuatan besar di kawasan ini.
- Akhirnya, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan luar negeri AS di bawah Donald Trump di Asia Pasifik justru bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peranan yang konstruktif sambil mengoptimalkan pencapaian kepentingannya.

Ide kerjasama indo-pasifik (kompas, 30 Januari 2018)

- Dalam kunjungannya ke India dan Pakistan baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada kedua tuan rumah mengenai pentingnya membangun ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan yang dikenal dengan ide kerja sama Indo-Pasifik.
- Ide ini sudah pernah dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tahun 2013 melalui ide *Indo-Pacific Treaty* yang intinya menolak prinsip *struggle for power* dan menonjolkan konsep *dynamic equilibrium*.

Konteks dinamika regional

Krisis nuklir Korea Utara

Sikap agresif China di LCS

Persaingan China dan India

Dua konsep kerjasama INDO-PASIFIK

KEPEMIMPINAN AS

- Menyatukan negara-negara demokrasi AS, Australia, Jepang dan India mengimbangi kebangkitan China.
- Penjajagan Pakta Militer Jepang dan Australia menghadapi China
- Ada ide IPTO (Indo-Pacific Treaty Organization).

KEPEMIMPINAN CHINA

- Kerjasama non-ideologis dan pragmatis melalui instrumentalisasi perdagangan dan investasi OBOR.
- Kombinasi hard power dan soft power China untuk merangkul semua negara di bawah kepemimpinan China.

Gagasan Indonesia

Ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran

Menolak *power rivalry*

Kerjasama yang inklusif, terbuka dan komprehensif

SOFT POWER DIPLOMACY RI



MODERATE and PEACEFUL POWER



DUKUNGAN CIVIL SOCIETY DALAM
NEGERI



PENEGAKAN HUKUM DAN
DERADIKALISASI ATASI TERORISME

PENUTUP DAN SIMPULAN

- Demokrasi sebagai kerangka politik tata kelola kebhinekaan RI merupakan modal politik menghadapi tantangan dan persaingan di tingkat regional maupun global.
- Bangkitnya China dan India menciptakan peluang ekonomi tetapi juga tantangan dalam membangun arsitektur keamanan dan stabilitas Kawasan.
- Gagasan kerjasama Indo-Pasifik merupakan alternatif terhadap persaingan kerjasama versi AS maupun China yang bertumpu pada pertarungan kekuatan dan ideologis.
- Kapasitas domestik RI perlu terus ditingkatkan karena diplomasi yang efektif akhirnya ditentukan oleh kekuatan internal dan bukan *soft power* semata.

Terima Kasih

referensi

- Acharya, Amitav. (2014). *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*. Singapore: World Scientific.
- Jemadu. Aleksius. (2018). “Kerjasama Indo-Pasifik”, *Kompas*, 30 Januari 2018.
- _____ (2017). “China dan Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan”, *Kompas*, 30 November 2017.
- Kueh, K.K. (2012). *Pax Sinica: Geopolitics and Economics of China's Ascendance*. Hongkong: Hongkong University Press.